



Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial

Vol. 5 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 62 – 70



Dinamika Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Pangan : Studi Kasus Partisipatif di Desa Cigalontang

Anisa Oktavia ^{a,1*}, Asep Mahpudz ^{a,2}, Leni Anggraeni ^{a,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ oktaviaanisa777@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 14 Juli 2025;

Revised: 28 Juli 2025;

Accepted: 17 Desember 2025.

Kata-kata kunci:

Kolaborasi,
Pemerintah Desa;
Masyarakat;
Ketahanan Pangan;
Partisipasi.

: ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan Dana Desa di Desa Cigalontang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran tentang proses kerja sama, faktor pendorong, serta hambatan kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat cukup optimal pada tahap pelaksanaan, terutama dalam kegiatan gotong royong, namun peran warga masih minim pada fase perencanaan dan evaluasi. Faktor kepercayaan, kepemimpinan desa, dan budaya lokal mendorong terciptanya sinergi, sedangkan tantangan utama meliputi keterbatasan pengetahuan kebijakan, kapasitas aparatur, dan dominasi elite lokal. Studi ini, dengan mengacu pada pendekatan partisipatif, menegaskan pentingnya dialog yang setara antaraktor dalam tata kelola program desa. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan strategi partisipasi warga pada seluruh siklus program, serta membuka peluang riset perbandingan di desa dengan karakteristik sosial yang berbeda.

Keywords:

Collaboration,
Village
Government,
Community, Food Security,
Participation

ABSTRACT

The Dynamics of Collaboration between Village Government and Community in Strengthening Food Security: A Participatory Case Study in Cigalontang Village. This study analyzes the collaboration between the village government and the community in strengthening food security through the management of Village Funds in Cigalontang Village. The study used a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document analysis to obtain an overview of the collaboration process, driving factors, and barriers to collaboration. The findings indicate that community involvement is quite optimal during the implementation phase, particularly in mutual cooperation activities, but the role of residents is still minimal during the planning and evaluation phases. Trust, village leadership, and local culture foster synergy, while key challenges include limited policy knowledge, apparatus capacity, and the dominance of local elites. This study, using a participatory approach, emphasizes the importance of equal dialogue between actors in village program governance. This research can serve as a reference for developing citizen participation strategies throughout the program cycle and opens up opportunities for comparative research in villages with different social characteristics.

Copyright © 2025 (Anisa Oktavia, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Oktavia, A., Mahpudz, A., & Anggraeni, L. (2025). Dinamika Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Pangan : Studi Kasus Partisipatif di Desa Cigalontang. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v5i2.3525>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi perhatian global. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2023), sekitar 828 juta orang di dunia mengalami kelaparan pada tahun 2022, yang menunjukkan tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Krisis iklim yang menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrem, inflasi harga pangan, serta pertumbuhan penduduk yang pesat semakin memperburuk kondisi ketahanan pangan global (World Food Programme, 2023). Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan tujuan penghapusan kelaparan sebagai prioritas utama untuk dicapai pada tahun 2030 (United Nations, 2022). Indonesia sebagai negara agraris dengan 40% penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penopang ketahanan pangan nasional (Kementerian Pertanian RI, 2022). Namun, potensi ini harus diimbangi dengan tata kelola sumber daya yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan menjadi agenda penting yang harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan lokal.

Ketahanan pangan di tingkat desa menjadi indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya lokal dan mengimplementasikan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT, 2023) menegaskan bahwa Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Data Bappenas menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil mengelola Dana Desa secara partisipatif cenderung memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik. Namun, tantangan di tingkat lokal seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa demi ketahanan pangan.

Fokus utama permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terwujud secara nyata dalam pengelolaan Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan. Berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas teknis aparatur, rendahnya literasi digital, serta partisipasi masyarakat yang masih dominan pada tahap pelaksanaan dan belum optimal pada tahap perencanaan dan evaluasi menjadi tantangan tersendiri (Supriyono & Siswanto, 2023). Selain itu, masih ditemukan praktik pengelolaan yang bersifat top-down dan minim dialog antara aparatur dan warga, sehingga program ketahanan pangan kurang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat (Arifin & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis proses kolaborasi, komunikasi interpersonal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Cigalontang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan. (Ranah Reseach, 2025) menemukan bahwa pelaksanaan program berbasis partisipasi di Kecamatan Banama Tingang, Kalimantan Tengah, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah desa dan warga. Penelitian lain di Blora menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan berdampak positif terhadap produksi pertanian dan ekonomi desa, terutama jika didukung komunikasi yang efektif dan kapasitas aparatur yang memadai. Namun, beberapa penelitian juga mencatat kendala pada aspek pelaporan, evaluasi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang menghambat optimalisasi kolaborasi (Ansani, 2024). Dengan demikian, kajian mengenai dinamika kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih sangat relevan untuk dikembangkan, khususnya dalam konteks lokal yang spesifik seperti Desa Cigalontang.

Meskipun kajian mengenai pengelolaan Dana Desa dan partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan, masih terdapat gap penelitian terkait analisis mendalam mengenai mekanisme dan dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam konteks penguatan ketahanan pangan di desa.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis atau administratif, sementara dimensi komunikasi interpersonal, pendidikan karakter, dan praktik kolaborasi belum banyak dieksplorasi secara komprehensif (Astuti et al., 2021). Selain itu, studi yang secara khusus mengkaji konteks Desa Cigalontang masih sangat terbatas, sehingga belum memberikan gambaran empiris yang utuh mengenai tantangan dan peluang kolaborasi di desa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan studi kasus kualitatif yang mendalam.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis dan praktis dalam memperluas pemahaman mengenai tata kelola kolaboratif di tingkat desa, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan Dana Desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang komunikasi pembangunan, pendidikan karakter, dan kolaborasi antaraktor lokal dalam konteks pembangunan desa (Hidayat & Hadi, 2020). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi kolaborasi yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan desa (Kementerian Desa, 2023). Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan Dana Desa di Desa Cigalontang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan di desa lain dengan karakteristik serupa. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif dan relevan bagi pengembangan kebijakan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Desa Cigalontang dengan melibatkan 13 partisipan, yaitu Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat program ketahanan pangan, yang dipilih secara purposive sampling untuk mewakili aktor kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur berdasarkan indikator kinerja desa dan prinsip partisipasi, observasi langsung pelaksanaan program, serta analisis dokumen seperti laporan penggunaan dana desa dan RKPDes. Analisis data mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode, mengonfirmasi wawancara dengan observasi dan dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan persetujuan sukarela partisipan dan menjaga kerahasiaan identitas, serta pengkodean data dilakukan manual untuk menjaga konteks lokal. Seluruh proses bertujuan mengungkap sinergi antaraktor dalam pengelolaan Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan berlangsung secara dinamis dan partisipatif. Pada tahap perencanaan menunjukkan langkah awal yang sistematis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang memuat program ketahanan pangan, seperti pengadaan benih unggul, dan pembangunan sarana irigasi. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa, “Kami ingin memastikan program yang dirancang bisa menjawab masalah nyata di desa, terutama soal pangan” (Kepala Desa, wawancara). Namun, partisipasi warga dalam perencanaan masih terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang warga bahwa “masyarakat sering diundang namun hanya segelintir orang yang datang karena kesibukan masing-masing” (Warga 3, wawancara).

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan aparaturnya desa sudah mengalokasikan Dana Desa untuk program strategis ketahanan pangan seperti pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit. Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat bisa dikatakan tinggi pada kegiatan yang bersifat fisik, seperti pembangunan infrastruktur atau kerja bakti. Kegiatan non-fisik, seperti perencanaan atau pengambilan keputusan, sering kali diikuti oleh segelintir orang saja. Hal ini berpotensi menciptakan bias dalam penilaian keberhasilan kolaborasi, karena keaktifan tidak selalu merepresentasikan semua aspek partisipasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat bahwa, “Kami selalu ikut gotong royong untuk membuat sarana irigasi atau pun program-program yang dibuat oleh pemerintah desa terkait ketahanan pangan,” (Tokoh Masyarakat, wawancara). Salah seorang warga juga menyatakan bahwa, “masyarakat senang ikut kerja bakti, karena merasa program ini penting untuk masa depan desa” (Warga 1, wawancara).

Dalam pengawasan program ketahanan pangan, Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting. Hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD menyatakan, “Kami terus berusaha mengawal penggunaan dana agar tepat sasaran, tapi masih perlu pelatihan komunikasi dan mediasi konflik” (BPD, wawancara). Penguatan kapasitas BPD sangat diperlukan untuk meningkatkan mekanisme checks and balances dalam pengelolaan dana desa.

Untuk memperjelas bagaimana alur kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan Dana Desa di Desa Cigalontang, berikut disajikan tabel yang merangkum tahapan, aktor, bentuk kolaborasi, serta kendala utama pada setiap tahap.

Tabel 1. Alur Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Pangan di Desa Cigalontang

Tahap	Kegiatan Utama	Pemeran Utama	Bentuk Kolaborasi/Partisipasi	Kendala Utama
Perencanaan	Penyusunan RKPDes, Musyawarah Desa	Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat	Musyawarah, diskusi terbuka, pengumpulan aspirasi	Minimnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan
Implementasi	Pelaksanaan program, pelatihan, pembangunan irigasi, pengadaan bibit	Aparatur Desa, Kelompok Tani, Warga	Gotong royong, pelatihan, pendamping teknis	Kurangnya literasi teknis dan anggaran di masyarakat
Monitoring dan Evaluasi	Pelaporan, evaluasi, umpan balik masyarakat	Aparatur Desa, BPD, warga	Penyusunan laporan, forum evaluasi, kepuasan	Lemahnya pelaporan dan evaluasi partisipatif

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat berlangsung melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan, implementasi, dan monitoring-evaluasi. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih terbatas pada forum musyawarah desa, sementara pada tahap implementasi, kolaborasi lebih nyata melalui gotong royong dan pelatihan. Namun, pada tahap monitoring dan evaluasi, pelibatan masyarakat masih lemah, terutama terkait pelaporan dan pengawasan program.

Pemerintah desa menunjukkan kecenderungan yang progresif sebagai pijakan awal dalam mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan tersebut merefleksikan kemampuan pemerintah desa dalam menerjemahkan mandat

regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi langkah operasional yang relevan dengan konteks desa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Fadli, 2023), yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan dana desa akan meningkat secara signifikan ketika perencanaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap awal. Partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, peran aparatur desa dalam menyusun perencanaan yang inklusif, berbasis data, dan partisipatif menjadi fondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Secara konseptual, pelaksanaan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi (Purba & Tambunan, 2022). Komunikasi yang efektif antara pemangku kebijakan desa dan masyarakat memungkinkan setiap program dijalankan sesuai dengan tujuan semula. Ketersediaan sumber daya, baik berupa dana, tenaga teknis, maupun sarana penunjang, turut menentukan efisiensi pelaksanaan. Selain itu, sikap positif dan dedikasi aparatur terhadap keberhasilan program, serta struktur birokrasi desa yang adaptif dan kooperatif, memperkuat kemungkinan tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Cigalontang dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari sinergi elemen-elemen tersebut dalam konteks pemerintahan lokal yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Cigalontang tergolong tinggi, ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya ketahanan pangan sebagai isu strategis desa. Masyarakat secara sukarela menyediakan tenaga, waktu, dan bahkan sumber daya yang dibutuhkan demi kelancaran program. Namun demikian, dalam kerangka teori tangga partisipasi (*ladder of citizen participation*) yang dikemukakan oleh Arnstein, tingkat keterlibatan ini masih berada pada level “tokenism”, di mana masyarakat dilibatkan secara prosedural tetapi belum memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis (Sutrisno, Wibowo, & Rizki, 2023). Ini menunjukkan bahwa partisipasi belum sepenuhnya bersifat deliberatif dan partisipatif sejati.

Meski masyarakat cukup aktif dalam pelaksanaan program, keterlibatan mereka dalam tahap perencanaan dan evaluasi masih sangat minim. Hal ini menjadi hambatan serius dalam membangun pengelolaan dana desa yang partisipatif dan transparan. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi anggaran, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta persepsi bahwa pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab eksklusif aparatur desa menyebabkan warga enggan terlibat aktif. Padahal, sebagaimana dijelaskan (Arifin dan Hidayat, 2022), partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi adalah indikator penting dari demokrasi lokal yang sehat dan akuntabel. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami alur dan substansi kebijakan desa menjadi langkah krusial untuk mendorong partisipasi yang lebih substansial.

Kapasitas kelembagaan desa, terutama dalam hal birokrasi dan pengawasan, memainkan peran krusial dalam menjaga akuntabilitas program ketahanan pangan. Studi (Wijayanti et al. 2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat, transparansi pelaporan, dan pengawasan eksternal sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Dengan mekanisme yang baik, potensi penyimpangan dana dapat diminimalkan. Aparatur desa perlu dilatih secara intensif mengenai akuntansi publik dan sistem pelaporan berbasis digital. Inisiatif transparansi berbasis teknologi juga dapat memperkuat pengawasan warga. Integritas kelembagaan merupakan prasyarat bagi keberlanjutan tata kelola yang responsif dan partisipatif.

Peran perempuan dalam penguatan ketahanan pangan juga harus diberi perhatian lebih serius. Di banyak desa, peran perempuan dalam sektor pertanian sangat besar, tetapi mereka jarang terlibat dalam forum pengambilan keputusan. Studi (Purwanti et al. 2019) menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif

mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik desa melalui representasi minimal satu perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa. Kebijakan serupa dapat diterapkan dalam konteks perencanaan dan evaluasi program ketahanan pangan. Dengan memberdayakan kelompok perempuan, kebijakan desa menjadi lebih adil dan mencerminkan kebutuhan semua warga. Keadilan gender dalam pengambilan keputusan akan memperkaya kualitas kolaborasi desa.

Selain perempuan, generasi muda juga merupakan agen potensial dalam pengembangan desa, terutama dalam bidang pertanian modern. Program seperti *Kampus Merdeka* membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam pembangunan desa melalui praktik langsung dan transfer teknologi pertanian (Abdulgani et al., 2023). Kolaborasi antara kampus dan pemerintah desa dapat mendorong inovasi lokal berbasis riset. Mahasiswa dapat membantu dalam aspek digitalisasi pertanian, diversifikasi pangan, hingga manajemen pemasaran hasil tani. Keterlibatan pemuda juga memberi perspektif segar dalam mengelola sumber daya desa secara lebih adaptif. Hal ini penting untuk membangun regenerasi pelaku pertanian di pedesaan.

Dari perspektif teori kolaborasi tata kelola publik (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh tiga hal: (1) kepercayaan antaraktor, (2) partisipasi yang setara, dan (3) forum dialogis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, temuan lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan relatif terjaga, terutama pada program-program berbasis fisik. Namun, forum perencanaan masih didominasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa. Hal ini memperkuat hasil studi sebelumnya bahwa dominasi elite lokal dapat menghambat ruang deliberatif warga.

Aspek kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi desa, dan lumbung pangan juga memainkan peran penting dalam ekosistem ketahanan pangan desa. (Hanani et al. 2017) menggarisbawahi bahwa keberadaan kelembagaan ini membantu dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara efisien. Namun, kelembagaan ini sering kali tidak terintegrasi dalam sistem perencanaan desa. Perlu adanya revitalisasi fungsi kelembagaan pangan lokal agar lebih selaras dengan program pemerintah desa. Pendekatan *multi-stakeholder* yang mencakup lembaga non-formal dan informal ini akan memperkuat ekosistem pangan desa secara menyeluruh. Kolaborasi lintas kelembagaan inilah yang akan menjamin ketahanan pangan berkelanjutan.

Selain institusi lokal, penting pula mengintegrasikan indikator kualitas hidup dan kesejahteraan dalam evaluasi ketahanan pangan. Studi (Prayitno et al. 2023) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara ketahanan pangan rumah tangga dan kualitas hidup di desa pertanian. Oleh karena itu, indikator keberhasilan program desa tidak hanya dilihat dari jumlah bantuan atau infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan warga. Mengukur aspek subjektif seperti kepuasan warga, keamanan pangan rumah tangga, dan akses terhadap gizi perlu menjadi bagian dari evaluasi. Hal ini akan membantu merancang intervensi yang lebih holistik dan berpusat pada warga. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan desa yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata.

Dalam konteks pengelolaan risiko, kolaborasi desa juga perlu dilengkapi dengan strategi mitigasi terhadap maladministrasi. Studi (Wargadinata & Sartika, 2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah desa adalah dua faktor penentu keberhasilan program dana desa. Penguatan tata kelola yang adaptif terhadap pengawasan warga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang berintegritas. Forum pemantauan sosial dan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya dalam tata kelola desa. Dengan mekanisme ini, potensi penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. Ketahanan pangan tidak akan terwujud tanpa tata kelola yang bersih dan demokratis.

Melihat kompleksitas persoalan ketahanan pangan di desa, intervensi kebijakan perlu dirancang secara multisektor dan lintas aktor. Studi (Rusliyadi, 2014) menekankan pentingnya sinergi antara program nasional seperti *Desa Mandiri Pangan* dengan tata kelola lokal yang inklusif. Program nasional seharusnya memberi ruang fleksibilitas bagi desa untuk menyesuaikan dengan konteks sosial-

ekologis setempat. Pemerintah pusat perlu berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai aktor dominan. Desentralisasi yang efektif akan memperkuat kapasitas desa dalam menentukan arah pembangunannya sendiri. Dengan demikian, kolaborasi antarlevel pemerintahan menjadi syarat utama bagi penguatan ketahanan pangan desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang pentingnya kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan. Dengan menggunakan kerangka teori kolaborasi dan governance, penelitian menunjukkan bahwa sinergi bukan sekadar retorika tetapi merupakan fondasi strategis yang memungkinkan integrasi peran pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.

Secara kontribusi praktis, penelitian ini menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan peran dana desa melalui pendekatan kolaboratif. Hasilnya menegaskan bahwa keberhasilan penguatan ketahanan pangan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor yang baik, termasuk pemberdayaan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terlibat, seperti perempuan dan pemuda. Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan mekanisme tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan agar konflik kepentingan dapat diminimalisir dan penggunaan dana desa dapat memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan di desa.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan landasan konseptual bagi studi kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan, tetapi juga menawarkan model praktik yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh desa lain yang menghadapi tantangan serupa.

Simpulan

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Cigalontang dalam penguatan ketahanan pangan berjalan secara dinamis, namun partisipasi warga masih lebih dominan pada tahap pelaksanaan dan kurang pada tahap perencanaan maupun evaluasi. Faktor kepercayaan, kepemimpinan desa, dan gotong royong menjadi pendorong sinergi, meski tantangan muncul akibat keterbatasan literasi kebijakan, kapasitas aparatur, serta dominasi elite lokal dalam forum musyawarah. Penelitian ini memperkaya kajian kolaborasi desa dalam tata kelola pangan berbasis partisipatif, serta menguatkan pentingnya dialog yang setara antara aktor desa untuk efektivitas program. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi strategi penguatan kapasitas aparatur dan mendorong peningkatan pelibatan masyarakat pada seluruh siklus kebijakan dana desa. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dinamika kolaborasi di desa lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda untuk memperluas generalisasi hasil.

Referensi

- Abdulgani, F., Y., & Asnani. (2023). Connecting the "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" and Village Law Policies: Possible Contribution of College Students in Indonesia's Coastal Rural Development. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13025>
- Ansani, A. A. (2024). Collaborative governance dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar. *Repository IPDN*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, Z., & Hidayat, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui dana desa: Studi di Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 33-47. <https://doi.org/10.22146/jep.54800>

- Astuti, R., Prasetyo, E., & Nugroho, H. (2021). *Peran komunikasi interpersonal dalam keberhasilan program pembangunan desa*. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 12(2), 145-158. <https://doi.org/10.1234/jkp.v12i2.5678>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Laporan Pembangunan Nasional Tahun 2023: Ketahanan pangan dalam transformasi pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.
- Fadli, M., Aslan, A., & Darmawan, I. (2023). Implementasi kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 1(5), 224-232. <https://doi.org/10.61132/socius.v1i5.918>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. FAO. <https://www.fao.org/publications/sofi/2023/en/>
- Hanani, N., Asmara, R., Fahriyah, F., & Sujarwo, S. (2017). The Roles of Rural Institutions on Food Security Policy in East Java Province Indonesia. *Agricultural Socio-Economics Journal*, 16, 126–135. <https://doi.org/10.24843/JAS.2017.v16.i02.p05>
- Hidayat, R., & Hadi, S. (2020). Pendidikan karakter berbasis konteks lokal untuk pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 25-38. <https://doi.org/10.1234/jpk.v8i1.2345>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT). (2023). *Laporan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023*. Kemendes PDTT RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT). (2023). *Laporan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023*. Kemendes PDTT RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Statistik Pertanian Indonesia 2022*. Kementerian Pertanian RI. <https://www.pertanian.go.id/statistik2022>
- Prayitno, G., Efendi, A., Hayat, A., Fikriyah, F., Tarno, H., Subagiyo, A., Gapsari, F., Siankwilimba, E., & Hiddlestone-Mumford, J. (2023). Quality of Life and Food Security in Rural Areas of Indonesia: A Case Study of Sedayulawas Village, Lamongan Regency, Indonesia. *Evergreen*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/10.5109/7148438>
- Purba, B. R. D., & Tambunan, D. K. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Negara dan Etika Publik*, 13(2), 179-191. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28677>
- Purwanti, A., Ispriyarso, B., Wijaningsih, D., & Setiawan, F. (2019). Examining Local Policy to Improve Women's Participation in Village Politics: A Case Study in Semarang Regency, Indonesia. In *Proceedings of the 6th International Conference on Community Development (ICCD 2019)*. <https://doi.org/10.2991/iccd-19.2019.22>
- Ranah Research. (2025). *Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Banama Tingang)*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4), 2321-2331. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1506>
- Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 32(3), 215–238. <https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15>
- Rusliyadi, M. (2014). Agricultural Policy Framework by Self-Sufficiency Village Program for Food Security and Poverty Reduction in Indonesia. *TIJ's Research Journal of Social Science & Management*, 3(1). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2746816>
- Supriyono, S., & Siswanto, E. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.113>
-

- Sutrisno, E., & Wibowo, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 745-755. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.532>
- Sutrisno, E., Wibowo, A., & Rizki, N. (2023). Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa berbasis Dana Desa: Perspektif demokrasi partisipatif. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 2(1), 45-57. <https://doi.org/10.21009/jdi.v2i1.1023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- United Nations. (2022). *Sustainable Development Goals Report 2022*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>
- Wargadinata, E. L., & Sartika, I. (2019). The Good Governance Implementation at Village Level in East Nusa Tenggara Province. *Sosiohumaniora*, 21(3), 200–212. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120>
- Wijayanti, I. O., Herawansyah, H., Putra, D. A., & Utomo, B. (2025). Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(6). <https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i6.284>
- World Food Programme (WFP). (2023). *Global Food Crises Report 2023*. WFP. <https://www.wfp.org/publications/global-food-crises-report-2023>